

## PENINGKATAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MELALUI IMPLEMENTASI GOESSTI: ANALISIS STRATEGIS DI BAPPEDA KOTA SEMARANG

**Gusti Ayu Dewi Puspasari<sup>1\*</sup>, Agus Budi Santoso<sup>2</sup>.**

<sup>1&2</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

### **Jurnal Riptek**

Volume 19 No. 1 (49-58)

Tersedia online di:

<http://ripteك.semarangkota.go.id>

### **Info Artikel:**

Diterima: 20 Februari 2025

Disetujui: 07 Mei 2025

Tersedia online: 30 Juni 2025

### **Kata Kunci:**

GOESSTI, Pengelolaan Persediaan, Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas, Analisis SWOT

### **Korespondensi penulis:**

\*Email: [gustipuspasari85@gmail.com](mailto:gustipuspasari85@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of the GOESSTI (Google Spreadsheets Internal) application in inventory management to support accountable financial reporting at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Semarang City more broadly, to help the preparation of accountable financial statements at the Semarang City Government level. The study employs a qualitative research design with an inductive descriptive approach, with data collection through documentation, observation, and in-depth interviews with 11 informants, including the Head of Bappeda, Division Heads as Budget Users, and Inventory Managers. This study's data analysis employs the SWOT Matrix analysis tool. The results show that the Strengths and Weaknesses indicator (IFAS) weighting obtained was 1.17, and the total weighting score of the Opportunities and Threats (EFAS) indicator was 1.04. This positions GOESSTI in quadrant I (Growth Strategy), utilizing internal strengths to capitalize on external opportunities. The implementation of GOESSTI has successfully improved financial reporting accuracy, transparency, and accountability through standardized recording formats, real-time data integration, and comprehensive audit trails. The research recommends further system development, human resource capacity building, and potential expansion to other government agencies to optimize inventory management within the Semarang City Government environment.*

Cara mengutip:

Puspasari, G.A.D. & Santoso, A. 2025. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Melalui Implementasi GOESSTI: Analisis Strategis di BAPPEDA Kota Semarang. Vol. 19 (1) Halaman 49-58. <http://ripteك.semarangkota.go.id>

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan e-government dimana pengelolaan keuangan dan BMD membutuhkan sebuah aplikasi yang sistematis, terintegrasi dan dapat menyajikan laporan secara tepat waktu, dengan demikian diperlukan adanya pengelolaan dokumen secara digital. Untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan keuangan, Pemerintah Kota Semarang mewajibkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai sistem terintegrasi antara Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 penerapan aplikasi SIPD ditujukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan yang baik sehingga tercipta penatausahaan keuangan yang akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Halim (2001) bahwa manajemen keuangan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mendorong kinerja organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Gil-Garcia dan Pardo (2005) juga menegaskan bahwa implementasi sistem informasi terintegrasi dalam pemerintahan memiliki dampak signifikan terhadap

peningkatan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 13 menyatakan bahwa konservasi jenis tumbuhan dan satwa tidak hanya dilakukan di dalam habitatnya, tetapi juga di dalam habitat aslinya karena beberapa spesies digunakan untuk mengurangi risiko kepunahan.

Penelitian terkait implementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah telah banyak dilakukan. Heeks (2003) dalam studinya di berbagai negara berkembang menemukan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada kesesuaian antara desain sistem dan realitas organisasi. Sementara itu, Indrajit (2002) mengidentifikasi bahwa transformasi digital pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM. Nurdin et al. (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa adopsi sistem informasi keuangan daerah berkorelasi positif dengan akuntabilitas pelaporan.

Penggunaan aplikasi SIPD sebagai media dalam penyajian laporan keuangan masih memiliki beberapa kendala salah satunya SIPD belum mengakomodir penatausahaan keuangan yang

berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan. Dimana data persediaan belum dapat ditampilkan secara terintegrasi di SIPD. Jika laporan persediaan ini masih menggunakan cara manual yaitu dengan menggunakan Ms. Excel tentunya akan ditemukan berbagai kendala yaitu:

1. Kompilasi data persediaan antar bidang membutuhkan waktu yang lama;
2. Ketika melakukan salin data ditemukan, muncul notifikasi "REFF" yang artinya rumus yang tidak berfungsi dengan sempurna sehingga data persediaan tidak valid;
3. Pengurus barang harus melakukan pengecekan ulang atas rumus dari tabel persediaan tersebut.

Atas kondisi ini tentunya akan menyebabkan data persediaan disajikan tidak akurat dan data tidak dapat tersaji secara tepat waktu.

Pemerintah Kota Semarang juga telah menyediakan sebuah sistem untuk penatausahaan persediaan yaitu Sistem Informasi Persediaan (SIP), namun dalam penggunaan sistem tersebut masih terdapat kendala antara lain masih terbatasnya fitur laporan yang dibutuhkan pengguna, laporan persediaan belum dapat jika ditampilkan per Bidang, sistem sering mengalami error pada saat digunakan sehingga masih tetap harus disusun dokumen pendamping, dan perbaikan sistem jika terdapat kendala akan membutuhkan waktu yang lama serta hasil laporan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dampak yang muncul adalah data barang persediaan tidak dapat tersaji secara akurat.

Menurut *World Bank* (2020), *e-government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan pihak eksekutif lainnya. Implementasi *e-government* tidak hanya sekadar digitalisasi proses pemerintahan, tetapi merupakan transformasi mendasar dalam tata kelola publik dimana hal tersebut dikemukakan Janssen & Van der Voort (2016).

Menurut Sugianing (2019) bahwa definisi dari *e-government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*. Implementasi *e-government*, sebagaimana dikemukakan oleh Moon dan Norris (2005), tidak hanya mentransformasi cara pemerintah memberikan layanan, tetapi juga

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. West (2004) menambahkan bahwa teknologi digital dalam pemerintahan berperan penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik. Dalam konteks pengelolaan persediaan pemerintah, dimana *e-government* memungkinkan adanya integrasi data, otomatisasi proses, dan transparansi yang lebih luas.

Studi yang dilakukan oleh Criado et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dalam manajemen aset dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 37% dan mengurangi kesalahan administratif hingga 42%. Dalam penelitian Heeks & Bailur (2018) menekankan bahwa manfaat *e-government* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi dengan menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Dalam konteks kota pintar (*smart city*), *e-government* menjadi penghubung interkoneksi sistem dan layanan perkotaan (Nam & Pardo, 2019).

*Good governance* dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi kerja pelaporan keuangan yang akurat khususnya dalam pengelolaan barang persediaan. Penelitian relevan terkait yang membahas mengenai implementasi penerapan sistem informasi ataupun bentuk *e-government* yaitu Studi yang dikerjakan oleh Wulandary pada tahun 2022 mengkaji hubungan antara penerapan sistem akuntansi dan manajemen keuangan daerah terhadap performa pemerintah daerah. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan adanya dampak yang positif dan bermakna dari implementasi sistem akuntansi serta pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat daerah.

Mahmood et al. (2019) dalam studi di beberapa negara Asia menemukan bahwa digitalisasi pengelolaan inventaris pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran hingga 15-20%. Sementara itu, Chen et al. (2020) mengidentifikasi bahwa implementasi sistem informasi terintegrasi berbasis *cloud* telah terbukti meningkatkan akurasi data persediaan hingga 97% dibandingkan dengan sistem manual yang hanya mencapai 78%.

*E-government* sebagai fondasi konseptual menjadi landasan penting dalam implementasi GOESSTI. Pengelolaan barang persediaan dengan menggunakan aplikasi GOESSTI (*Google Spreadsheets Internal*) sebagai aplikasi pendukung dalam penyusunan laporan keuangan merupakan

sebuah inovasi yang memberikan solusi atas permasalahan dalam pengelolaan barang persediaan. Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan (Bastian, 2006). Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan laporan

persediaan dari hitungan minggu menjadi hitungan hari atau bahkan jam.

Implementasi GOESTTI telah memperkuat sistem pengendalian internal melalui mekanisme kontrol yang komprehensif. Sistem menerapkan manajemen akses berbasis peran (*role-based access control*) yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses dan memodifikasi data sesuai dengan kewenangannya. Dalam aplikasi GOESSTI dimana data persediaan dapat ditampilkan per sub unit kerja sehingga masing-masing sub unit kerja mempunyai kendali dalam pengambilan kebijakan yang tepat terkait persediaan.

No	Kode Rekening	Keterangan	Tgl	Jenis	Saldo Awal		Trans. Periode	Saldo Akhir	Total
					Debit	Kredit			
1	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	100.000	0	100.000
2	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	100.000	0	100.000
3	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2024	Jan	0	100.000	0	100.000	100.000
4	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2024	Jan	0	100.000	0	100.000	100.000
5	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2024	Jan	0	100.000	0	100.000	100.000
6	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	0	100.000	100.000
7	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2024	Jan	0	100.000	0	100.000	100.000
8	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2024	Jan	0	100.000	0	100.000	100.000
9	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	0	100.000	100.000
10	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	0	100.000	100.000
11	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	0	100.000	100.000
12	1010000000	Saldo Awal (Periode)	2023	Des	0	100.000	0	100.000	100.000
<b>Jumlah</b>									<b>1000.000</b>

Gambar 1. Tangkapan Layar Aplikasi GOESSTI

keuangan tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan.

GOESTTI telah meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan melalui standardisasi yang menyeluruh dalam format dan prosedur pencatatan. Sistem menghasilkan laporan yang konsisten dan dapat dibandingkan antar periode, memenuhi salah satu karakteristik kualitatif utama laporan keuangan yang baik. Implementasi GOESTTI juga telah mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini menjadi bukti nyata keberhasilan inisiatif *e-government* yang mendukung visi reformasi birokrasi.

Dari perspektif akurasi dan keandalan data, GOESTTI telah menghadirkan perubahan paradigma dalam pengelolaan persediaan melalui otomatisasi yang komprehensif. Sistem ini tidak hanya menyediakan perhitungan otomatis yang meminimalisir *human error*, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme validasi berlapis yang memastikan setiap transaksi dicatat dengan tepat. Format pencatatan yang terstandarisasi untuk seluruh jenis laporan telah mengeliminasi inkonsistensi data yang sebelumnya sering terjadi dalam pencatatan manual.

Bagi pembangunan kota, implementasi *e-government* dalam GOESSTI membawa manfaat strategis yang signifikan. Pertama, sistem ini mendukung perencanaan berbasis data (*data-driven planning*) yang memungkinkan alokasi sumber daya kota secara lebih efisien berdasarkan kebutuhan aktual (Meijer & Bolivar, 2016). Kedua, pengelolaan persediaan yang terintegrasi mengoptimalkan rantai pasok dalam pemerintah, meminimalisir pemborosan anggaran, dan memastikan ketersediaan sumber daya tepat waktu untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Brown et al., 2022). Ketiga, transparansi yang dihasilkan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan kota, menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat (Gil-Garcia et al., 2019).

Implementasi GOESTTI telah menghadirkan tingkat transparansi yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam pengelolaan persediaan. Sistem menyediakan visibilitas penuh terhadap setiap transaksi persediaan melalui fitur penelusuran (*audit trail*) yang komprehensif. Dalam aspek efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan, GOESTTI telah menghadirkan transformasi signifikan. Sistem ini telah mereduksi waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan terkait

Dalam konteks Kota Semarang, penerapan GOESSTI sejalan dengan visi pembangunan kota yang berkelanjutan, dimana efisiensi penggunaan sumber daya menjadi prioritas. Menurut Wirtz & Daiser (2018) menyatakan bahwa inovasi *e-government* seperti ini meningkatkan kapasitas pemerintah kota untuk merespon perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan juga tepat sasaran. Maka dari itu, implementasi GOESSTI tidak hanya merupakan solusi teknis

untuk pengelolaan persediaan, tetapi juga menjadi penggerak strategis dalam mewujudkan tata kelola yang lebih cerdas, responsif, dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, GOESSTI mempunyai keunggulan signifikan dalam pengelolaan persediaan. Berbeda dengan SIPD yang belum mengakomodasi penatausahaan persediaan, dan SIP yang memiliki keterbatasan fitur dan sering mengalami kendala/ *error*, GOESSTI menyediakan integrasi data yang terotomatisasi, format terstandarisasi, dan visibilitas data secara *real-time*. Sistem ini juga mengatasi keterbatasan penggunaan manual Ms. Excel yang rentan terhadap kesalahan formula dan membutuhkan waktu lama untuk kompilasi data. Keunggulan-keunggulan GOESSTI ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga secara signifikan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan persediaan di Bappeda Kota Semarang, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan secara keseluruhan di Pemerintah Kota Semarang.

## METODA ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif untuk menganalisis implementasi sistem aplikasi GOESSTI dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel di Bappeda Kota Semarang. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis masalah berdasarkan fakta di lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Suryabrata (2010) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi (pencandraan) terkait situasi atau fenomena.

Lokus penelitian dilakukan Bappeda Kota Semarang dengan melibatkan II informan kunci sebagai *expert judgement* yang terdiri dari Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran (PA) jumlah 1 orang, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jumlah 5 orang, dan Pengurus Barang (PB) jumlah 6 orang. *Expert judgement* menentukan faktor internal dan faktor eksternal melalui pengisian kuesioner dan wawancara mendalam. Pemilihan II informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam implementasi GOESSTI dan memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan persediaan di Bappeda. Kepala Bappeda dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan pengambilan keputusan terkait penerapan sistem. Para Kepala

Bidang berperan sebagai pengguna yang mengotorisasi transaksi persediaan, sementara Pengurus Barang merupakan operator utama sistem yang berinteraksi langsung dengan implementasi GOESSTI dalam operasional sehari-hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, kuesioner dan wawancara mendalam dengan II informan untuk mendapatkan informasi detail tentang implementasi sistem GOESSTI termasuk penentuan kelebihan, kekurangan, ancaman tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Kedua, studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, dokumen pengelolaan barang persediaan, dan dokumen terkait lainnya untuk memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Analisis data menggunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dikembangkan oleh Rangkuti (2015) untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi GOESSTI. Analisis SWOT merupakan metode evaluasi yang mengkaji empat aspek yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam suatu kondisi spesifik. Metode ini berfungsi untuk mengenali berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam berbagai konteks, seperti pelaksanaan proyek, penerapan strategi bisnis, pengembangan produk, maupun kinerja individu (Saputri, 2021).

Menurut Pearce dan Robinson (2013) menambahkan bahwa analisis ini bertujuan untuk mencocokkan kekuatan perusahaan dengan peluang yang ada di lingkungan sambil mengatasi kelemahan dan mengurangi dampak ancaman eksternal. Menurut Rangkuti (2015) alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Internal Eksternal	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESS (W)</b>
<b>OPPURTUNITIES (O)</b>	Strategi SO Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>THREATS (T)</b>	Strategi ST : Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Tabel 1. Matriks SWOT

Faktor internal dianalisis menggunakan matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) yang mencakup kekuatan dan kelemahan sistem, sedangkan faktor eksternal dianalisis menggunakan matriks EFAS (*External Factors Analysis Summary*) yang meliputi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah penentuan bobot untuk masing-masing faktor dengan skala 0 (tidak penting) hingga 1 (sangat penting), dimana total bobot untuk masing-masing kelompok faktor harus sama dengan 1. Tahap kedua adalah pemberian rating untuk setiap faktor dengan skala 1 (terendah) hingga 4 (tertinggi), hal tersebut disampaikan oleh Kornoushenko (2018) berdasarkan respon organisasi terhadap faktor tersebut. Tahap ketiga adalah perhitungan skor dengan mengalikan bobot dan rating untuk setiap faktor. Tahap keempat adalah penjumlahan total skor untuk masing-masing kelompok faktor (IFAS dan EFAS). Tahap kelima adalah penentuan posisi strategis organisasi dalam diagram *Cartesius* SWOT berdasarkan selisih total skor kekuatan-kelemahan (sumbu X) dan peluang-ancaman (sumbu Y).

Hasil analisis SWOT akan menghasilkan empat kemungkinan strategi: SO (*Strengths-Opportunities*), WO (*Weaknesses-Opportunities*), ST (*Strengths-Threats*), dan WT (*Weaknesses-Threats*). Strategi yang direkomendasikan akan dipilih berdasarkan posisi kuadran dalam diagram *Cartesius* SWOT, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan Bappeda Kota Semarang dalam mengoptimalkan implementasi sistem GOESSTI untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis SWOT, perhitungan skor IFAS dan EFAS dalam penelitian ini akan menghasilkan beberapa strategi yang dapat diprioritaskan oleh Bappeda Kota Semarang dalam implementasi sistem aplikasi GOESSTI untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

**A. Hasil Analisis SWOT**

Analisis SWOT mengidentifikasi atas faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

1. Nilai IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

Perhitungan skor bobot IFAS diperoleh dengan perkalian antara nilai bobot dan rating. IFAS merupakan internal faktor yang berisi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan dimana dari hasil pengamatan dilapangan, pengisian kuisioner dan hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks IFAS

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT T x RATING)
<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>			
Aplikasi GOESSTI dapat menampilkan data persediaan per Bidang secara terintegrasi	0,09	3,55	0,31
Memiliki format pencatatan yang terstandarisasi untuk semua jenis laporan	0,08	3,36	0,28
Interface aplikasi yang <i>user-friendly</i> dan berbasis <i>cloud computing</i>	0,09	3,45	0,29
Mendukung proses <i>stock opname</i>	0,09	3,73	0,34

barang persediaan secara berkala (3 bulanan)			
Menghasilkan berbagai jenis laporan sesuai kebutuhan pengguna	0,09	3,73	0,34
Aplikasi GOESSTI dapat menghasilkan efisiensi operasional	0,09	3,73	0,34
Otomatisasi perhitungan yang menjamin akurasi data keuangan	0,10	4,00	0,39
<b>Sub Total</b>			<b>2,30</b>
<b>Kelemahan (Weakness)</b>			
Ketergantungan pada koneksi internet dalam pengoperasian sistem	0,07	2,91	0,21
Keterbatasan SDM yang mampu melakukan maintenance sistem	0,07	2,82	0,20
Tantangan dalam masa transisi dari sistem manual ke digital	0,07	2,73	0,18
Belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	0,09	3,64	0,33
Belum terintegrasi dengan	0,09	3,64	0,33

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)			
Memerlukan pelatihan khusus bagi pengguna baru sistem	0,07	3,00	0,22
<b>Sub Total</b>			<b>1,13</b>
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>1,17</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total skor faktor *Strengths* adalah sebesar 2,30 dan total skor *Weaknesses* sebesar 1,13. Dengan demikian total skor IFAS adalah sebesar 1,17 yang diperoleh dari pengurangan total skor *Strengths* dan skor *Weaknesses*.

2. Nilai EFAS (*Exsternal Factors Analysis Summary*)

EFAS merupakan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dapat mempegaruhi strategi organisasi.

Tabel 3. Matriks EFAS

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT × RATING)
<b>Peluang (Opportunity)</b>			
Mendukung visi misi reformasi birokrasi	0,08	3,45	0,28
Tuntutan akuntabilitas laporan keuangan	0,09	4,00	0,37
Dukungan kebijakan <i>e-government</i>	0,08	3,36	0,26
Potensi pengembangan ke OPD lain	0,08	3,45	0,28
Peningkatan transparansi pengelolaan	0,08	3,36	0,26
Integrasi dengan Sistem lain	0,07	3,18	0,24

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR (BOBOT x RATING)
Perluasan Cakupan Pengelolaan	0,08	3,36	0,26
Peningkatan Efisiensi Anggaran	0,07	3,09	0,22
<b>Sub Total</b>	<b>0,64</b>		<b>2,18</b>
<b>Ancaman (Threat)</b>			
Perubahan Regulasi Keuangan Daerah	0,07	3,18	0,24
Risiko Keamanan Data	0,08	3,27	0,25
Perubahan Struktur Organisasi	0,07	3,18	0,24
Gangguan Teknis Sistem	0,07	2,91	0,20
Perkembangan Sistem Informasi Teknologi yang Cepat	0,07	3,09	0,22
<b>Sub Total</b>	<b>0,36</b>		<b>1,14</b>
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>1,04</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa total skor faktor *Opportunity* adalah sebesar 2,18 dan total skor *Threat* sebesar 1,14. Dengan demikian total skor EFAS adalah sebesar 1,04 yang diperoleh dari pengurangan total skor *Opportunity* dan skor *Threat*.

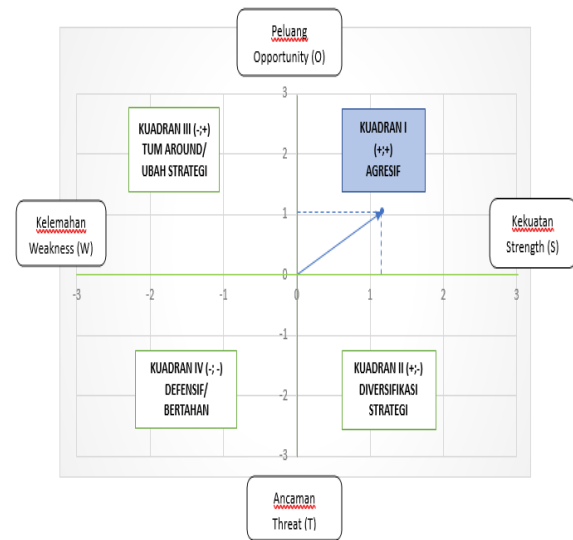
**B. Strategi Analisis SWOT**

Berdasarkan perhitungan IFAS dan EFAS di atas terdapat penilaian faktor internal dan faktor eksternal yang akan diterapkan pada diagram *Cartesius* sebagai strategi SWOT. Dimana sumbu x dari IFAS sebesar 1,17 dan sumbu Y dari EFAS sebesar 1,04 yang artinya aplikasi GOESSTI menduduki kuadran I yaitu strategi agresif. Analisis menunjukkan bahwa GOESSTI memiliki kekuatan yang cukup besar untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Titik temu antara perhitungan IFAS dan EFAS di atas yang berada pada kuadran I antara sumbu *Strenghts* dan *Opportunity* maka

diperoleh strategi S-O (*Strenghts* dan *Opportunity*).

Strategi SO artinya adalah bahwa dalam mengimplementasikan aplikasi GOESSTI di Bappeda Kota Semarang dengan memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Opportunities*) dalam mendukung terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel. Strategi S-O yang dilakukan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut:



**Gambar 2. Kuadran Analisis SWOT**

SO.1 Ekspansi sistem ke OPD lain dengan memanfaatkan keberhasilan implementasi di Bappeda sebagai model percontohan Keberhasilan implementasi di Bappeda Kota Semarang dapat menjadi model percontohan yang efektif. Proses ekspansi dapat dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kesiapan masing-masing OPD. Bappeda dapat berperan sebagai mentor dalam berbagi pengalaman dan praktik terbaik implementasi sistem, termasuk strategi mengatasi berbagai tantangan teknis dan operasional yang mungkin muncul.

SO.2 Integrasi data persediaan dengan sistem *e-government* lainnya untuk mendukung transformasi digital pemerintahan Peluang integrasi dengan sistem *e-government* lainnya seperti SIPD dan SIP membuka jalan bagi transformasi digital yang lebih komprehensif. Integrasi sistem dapat mengoptimalkan proses perencanaan dan pengendalian persediaan, mendukung kebijakan *paperless*, serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SO.3 Pemanfaatan jejak audit yang terstandar untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  
Jejak audit yang terstandar memungkinkan penelusuran setiap transaksi dan mendukung proses audit baik internal maupun eksternal, sementara sistem validasi otomatis mengurangi risiko kesalahan input dan manipulasi data.

SO.4 Pengembangan fitur analitik data untuk optimalisasi pengelolaan persediaan dan efisiensi anggaran.

Sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen analitis yang saling terhubung, dimulai dari *dashboard analytics* yang menyajikan visualisasi data *real-time* hingga pelaporan status persediaan secara komprehensif. Integrasi data menjadi aspek fundamental dalam sistem ini, dimana seluruh data dari berbagai sumber disinkronisasi secara otomatis dengan format yang terstandarisasi. Organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, mengoptimalkan proses pengadaan dan distribusi barang, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem aplikasi GOESSTI di Bappeda Kota Semarang telah berhasil mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel di Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Tahun 2023. Hasil evaluasi Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi tugas Bappeda pada tahun 2023 mendapat nilai sebesar 81,4 dengan kategori A dan naik menjadi 81,85 dengan kategori A pada tahun 2024. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah (Purnama dan Nadirsyah, 2016). Analisis SWOT yang dilakukan mengidentifikasi masing-masing 4 indikator pada *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Threats*. Dari hasil perhitungan, diperoleh skor pembobotan indikator IFAS (*Strengths* dan *Weaknesses*) sebesar 1.17 dan skor pembobotan EFAS (*Opportunities* dan *Threats*) sebesar 1.04, yang

menempatkan sistem ini pada kuadran I (Strategi Agresif).

Strategi prioritas yang direkomendasikan adalah strategi agresif (S-O) yang memanfaatkan kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang eksternal, meliputi empat strategi utama: ekspansi sistem ke OPD lain sebagai percontohan, integrasi dengan sistem *e-government*, pemanfaatan jejak audit terstandar, dan pengembangan fitur analitik data. Keberhasilan implementasi sistem GOESSTI ditunjukkan melalui peningkatan akurasi pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang persediaan.

Implementasi GOESTTI tidak hanya memberikan manfaat bagi internal Bappeda, tetapi juga bagi berbagai stakeholder eksternal. Bagi masyarakat umum, sistem ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset publik, memungkinkan akses informasi yang lebih mudah mengenai penggunaan anggaran untuk barang persediaan. Bagi auditor, baik internal maupun eksternal, GOESSTI memberikan jejak audit yang jelas dan terstruktur, memudahkan proses verifikasi dan pemeriksaan keuangan. Bagi pengambil kebijakan di tingkat pemerintah daerah, sistem ini menyediakan data *real-time* dan analitik yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Bagi mitra kerja pemerintah, sistem ini menciptakan proses pengadaan dan pengelolaan persediaan yang lebih efisien dan transparan.

Untuk keberlanjutan sistem ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem berkelanjutan, dan perluasan implementasi ke instansi pemerintah lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan persediaan yang terintegrasi dan dapat menjadi acuan bagi institusi pemerintahan lain dalam mengimplementasikan sistem serupa untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Makalah ini merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan di Bappeda Kota Semarang. Pada kesempatan ini tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran di Bappeda Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan, informasi serta fasilitas selama proses penelitian. Dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait dalam pengembangan dan implementasi sistem GOESSTI telah menjadi kunci keberhasilan dalam penelitian ini. Semoga hasil

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Anggraeni, E. Y. & Irviani, R., 2017. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi
- Bappeda Kota Semarang. 2025. <https://bappeda.semarangkota.go.id/goesst/login>
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Brown, A., Fishenden, J., & Thompson, M. (2022). Digital Government Transformation: Theory and Practice. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101664
- Cahyadi, A. 2003. E-Government: Konsep dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Chen, Y., Wang, L., Yang, M., & Xu, J. (2020). Cloud-based integrated inventory management systems: Implementation and benefits in governmental organizations. *Journal of Government Information Management*, 37(4), 389-407 <https://doi.org/10.1108/JGIM-11-2019-0042>
- Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Gil-García, J. R. (2021). Public Innovation and Digital Transformation in the Public Sector. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101620
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187-216. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.001>
- Halim, A. 2019. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, Jogyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 6. Yogyakarta: BPFY
- Heeks, R. (2003). Most eGovernment-for-development projects fail: How can risks be reduced? *iGovernment Working Paper Series, Paper No. 14*. Manchester: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
- Indrajit, R. E. (2002). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: ANDI
- Janssen, M., & Van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*, 33(1), 1-5
- Kornoushenko, E. K. (2018). Alternative Approach to Quantitative Estimation of the SWOT Analysis Solutions. *Proceedings of 2018 11th International Conference & "Management of Large-Scale System Development & "*, MLSD 2018. <https://doi.org/10.1109/MLSD.2018.855179>
- Mahmood, K., Shafique, F., & Munawar, S. (2019). Digital transformation of government inventory management in Asia: Challenges and impacts on budget efficiency. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 6(3), 23-41. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.2019070102RetryClaude does not have internet access. Links provided may not be accurate or up to date>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392-408
- Moon, M. J., & Norris, D. F. (2005). Does managerial orientation matter? The adoption of reinventing government and e-government at the municipal level. *Information Systems Journal*, 15(1), 43-60. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00185.x>
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2019). Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context.

Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 185-194

- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2018). The influence of external institutional pressures on local e-government adoption and implementation: A coercive perspective within an Indonesian local e-government context. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(1), e12046. <https://doi.org/10.1002/isd2.12046>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
- Purnama, F. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, AKuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya [Universitas Syiah Kuala]
- Robinson Jr, Richard B. & Pearce II, John A. 2013 Manajemen Strategis, Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, By McGrew- Hill Education and Salemba Empat, Jakarta Selatan
- Rangkuti, F. 2015. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugianing, M. 2019. Pengembangan E-Government Berbasis SPBE Terpadu. Bandung: Informatika
- Suryabrata. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. Syahidin, et.al
- West, D. M. (2004). E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15-27. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00343.x>
- Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). E-Government Strategy Process Instruments. *Public Administration Review*, 78(2), 234-247
- World Bank. (2020). Digital Government Readiness Assessment Toolkit. Washington, DC: World Bank Group
- Wulandary, A., & Rini, T. H. C. 2022. Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. *FAIR UNIMUDA*, 2(2), 45-57